

## **MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS CO-FIRING DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Sabilla Mega Yustika<sup>1\*</sup>**, Diana Hertati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

\*Korespondensi: Sabillamega9@Gmail.Com

### **ABSTRAK**

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Terkait Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di Kabupaten Sidoarjo. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Kualitatif Deskriptif Dengan Fokus Model *Collaborative Governance* Menurut Ansell & Gash (2008). Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dalam Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT. PLN Nusantara Power Dan PT. Bangga Indonesia Mulia Dalam Variabel Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan, Dan Proses Kolaborasi Telah Berjalan Dengan Baik. Namun Meskipun Demikian Hasil Sementara Dalam Kolaborasi Ini Masih Kecil Karena Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Hanya Mampu Mengelola Sampah 1% Dari 68.697.731 Kg Sampah Yang Masuk Pada Periode Januari Sampai April 2023.

**Kata Kunci :** *Collaborative Governance*; Pengelolaan Sampah; *Refuse Derived Fuel* (RDF).

### **ABSTRACT**

*This Research Aims To Find Out And Describe The Collaborative Governance Model In Refuse Derived Fuel (RDF) Based Waste Management In Kabupaten Sidoarjo. The Method Used In This Research Is Descriptive Qualitative With A Focus On The Collaborative Governance Model According To Ansell & Gash (2008). The Research Results Show That In The Collaborative Governance Model In Waste Management Based On Refuse Derived Fuel (RDF) Carried Out By The Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT. PLN Nusantara Power And PT. Bangga Indonesia Mulia In The Variables Of Initial Conditions, Institutional Design, Leadership And Collaboration Processes Have Gone Well. However, Despite This, The Temporary Results In This Collaboration Are Still Small Because Refuse Derived Fuel (RDF) Based Waste Management Is Only Able To Manage 1% Of The 68,697,731 Kg Of Waste Coming In From January To April 2023.*

**Keywords :** *Collaborative Governance*; Waste Management; *Refused Derived Fuel* (RDF).

### **A. PENDAHULUAN**

Salah Satu Provinsi Di Indonesia Yang Menempati Urutan Pertama Dengan Timbulan Sampah Terbesar Pada Tahun

2020 Yaitu Provinsi Jawa Timur Dengan Total Timbulan Sampah Sekitar Lima Juta Ton, Dengan Total Pengurangan Sampah Sekitar Tujuh Ratus Ribu Ton. Hal

Tersebut Juga Dipengaruhi Jumlah Timbulan Sampah Yang Dihasilkan Dari Berbagai Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Data Timbulan Sampah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Terdapat Kota Dan Kabupaten Yang Termasuk Dalam Lima Besar Dengan Total Timbulan Sampah Terbanyak Per Tahunnya, Yaitu:

Tabel 1 Data Timbulan Dan Pengurangan Sampah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)	Pengurangan Sampah Tahunan (Ton)
Kota Surabaya	811.255,10	67.678,68
Kab. Banyuwangi	454.940,49	45.747,69
Kab. Pasuruan	424.534,20	76.008,35
Kab. Sidoarjo	396.476,90	126.653,27
Kab. Malang	387.549,70	20.668,18

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2020

Berdasarkan Data Tersebut Kota Surabaya Menempati Peringkat Pertama Yang Memiliki Total Timbulan Sampah Sebanyak 811.255,10 Ton Dengan Capaian Pengurangan Sampah Sebesar 67.678,68 Ton. Kedua, Kabupaten Banyuwangi Memiliki Total Timbulan Sampah Sebanyak 454.940,49 Ton Dengan Capaian Pengurangan Sampah Sebesar 45.747,69 Ton. Ketiga, Kabupaten Pasuruan Memiliki Total Timbulan Sampah Sebanyak 424.534,20 Ton Dengan Capaian Pengurangan Sampah Sebesar 76.008,35 Ton. Keempat, Kabupaten Sidoarjo Memiliki Total Timbulan Sampah Sebanyak 396.476,90 Ton Dengan Capaian

Pengurangan Sampah Sebesar 126.653,27 Ton. Kelima Kabupaten Malang Memiliki Total Timbulan Sampah Sebanyak 387.549,70 Ton Dengan Total Capaian Sebesar 20.668,18 Ton.

Jika Ditinjau Lagi, Kabupaten Sidoarjo Menjadi Salah Satu Daerah Di Jawa Timur Dengan Capaian Pengurangan Sampah Terbesar Yang Mencapai 126.653,27 Ton. Kabupaten Sidoarjo Sendiri Telah Memiliki Target Capaian Dalam Pengelolaan Sampah Yang Di Atur Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dengan Target Pertama Dalam Pengurangan Sampah Sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) Dari Jumlah Timbulan Sampah. Kedua, Penanganan Sampah Yang Sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen) Dari Jumlah Timbulan Sampah. Target Tersebut Ditujukan Sebelum Dibentuknya Kebijakan Dan Strategi Nasional Penanganan Sampah Pada Tahun 2025.

Namun Pada Tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo Dalam Keadaan Darurat Sampah Hingga Menyebabkan Penutupan Sementara TPA Jabon Karena Mengalami Kelebihan Timbulan Sampah Dan Masih Tidak Beroperasinya Alat Pengelolaan Sampah. Permasalahan Tersebut Membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mencari Solusi, Salah Satunya Dengan Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Penguatan Koordinasi Dan Kerja Sama Antar Multi Sektor Terkait.

Dalam Mengimplementasikan Strategi Tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Melakukan Collaborative Governance Dengan PT.PLN Nusantara Power. Menurut (Ansell & Gash, 2008)

Mendefinisikan Collaborative Governance Sebagai Suatu Cara Dalam Pengelolaan Pemerintah Yang Melibatkan Secara Langsung Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintahan Dalam Berorientasi Pada Konsensus Dan Musyawarah Dalam Proses Pengambilan Keputusan Kolektif Yang Bertujuan Untuk Membuat Atau Melaksanakan Kebijakan Publik Serta Program-Program Publik. Adanya Kolaborasi Yang Dilakukan Oleh Multi Sektor Ini Dapat Meningkatkan Nilai Publik Daripada Dengan Bekerja Sendiri-Sendiri. Kerja Sama Ini Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Dengan Pengelolaan Sampah Berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).

Pengelolaan Sampah Berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) Ini Merupakan Bentuk Inovasi Dari Pemanfaatan Sampah Yang Ada Di Kabupaten Sidoarjo Sebagai Bahan Bakar Dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Inovasi Adalah Suatu Upaya Untuk Memperbaharui Sesuatu Yang Telah Dibuat Dan Dimanfaatkan Meliputi Layanan, Produk, Pemasaran, Metode Penyampaian, Operasi Bisnis Atau Kebijakan Yang Dapat Dikembangkan Melalui Inovasi (Hertati, 2023). Pada Tahun 2022 PT. PJB Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Telah Menandatangani Memorandum Of Understanding (Mou) Atau Nota Kesepahaman Terkait Kerja Sama Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) Untuk Bahan Bakar PLTU. Berdasarkan Latar Belakang Dan Data-Data Yang Telah Disajikan Diatas, Maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah “Bagaimana Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten

Sidoarjo?”

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian Ini Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode Kualitatif Dipilih Agar Data Yang Didapatkan Lebih Mendalam Dan Memiliki Makna Karena Dapat Langsung Mendalami Secara Langsung Objek Penelitian. Data Yang Ditemukan Akan Dianalisis Sehingga Memperoleh Hasil Penelitian Berupa Deskripsi Atau Gambaran. Lokasi Penelitian Ini Berlokasi Di Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan Menarik Dapat Dilihat Dari Data SIPSN Tahun 2020 Menunjukkan Bahwa Kabupaten Sidoarjo Memiliki Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah Dengan Capaian Pengurangan Sampah Paling Tinggi Di Provinsi Jawa Timur Dengan Persentase Sebesar 31,94%. Namun Di Tahun 2021 TPA Jabon Mengalami Kondisi *Overload* Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mempertimbangkan Untuk Melakukan Kerja Sama Dengan PT. PLN Nusantara Power Dalam Mengatasi Permasalahan Tersebut Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Fokus Yang Digunakan Sebagai Batasan Dalam Penelitian Ini Yaitu Model *Collaborative Governance* Yang Dikemukakan Oleh (Ansell & Gash, 2008). Dalam Teori Tersebut *Collaborative Governance* Dilihat Dari Empat Variabel Yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif, Dan Proses Kolaborasi. Sumber Data Pada Penelitian Ini Berasal Dari Narasumber, Dokumen, Dan Peristiwa Di Lapangan. Dimana Dalam Penentuan Narasumber Menggunakan *Purposive Sampling* Dengan *Key Informan* Yaitu Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Tempat Pembuangan Akhir (UPTD TPA) Griyo Mulyo Jabon. Kemudian Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Ini Menggunkan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Data Yang Telah Ditemukan Selama Penelitian Kemudian Dianalisis Menggunakan Teknik Miles Dan Huberman (1992) Dalam (Hardani, 2020) Yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data Dan Penarikan Kesimpulan. Selanjutnya Data Tersebut Akan Melewati Uji Kebenaran Untuk Membuktikan Data Yang Didapatkan Dapat Dipercaya Dan Dipertanggungjawabkan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Penelitian Yang Telah Dilakukan Terkait Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Yang Merupakan Kerja Sama Dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT. PLN Nusantara Power Dan PT. Bangga Indonesia Mulia Berjalan Pada Tahun 2022. PT. PLN Nusantara Power Melakukan Kolaborasi Dengan Sektor Pemerintah Lainnya Yakni Pemkab Sidoarjo, Dan PT Bangga Indonesia Mulia Yang Merupakan Fasilitator Penyedia Sarana Prasarana Dalam Pengelolaan Sampah, Sesuai Dengan Pendapat Yang Dikemukakan Oleh (Astuti Et Al., 2020) Yang Mengklasifikasikan Kolaborasi Yang Dilakukan Pemerintah Dengan Organisasi Diluar Pemerintah Menjadi Tiga Kelompok Kolaborasi, Yaitu Kolaborasi Yang Dilakukan Dengan Sektor Pemerintah Lainnya (Internal); Kolaborasi Yang Dilakukan Pemerintah Dengan Sektor Bisnis; Kolaborasi Yang Dilakukan Pemerintah Dengan Organisasi Masyarakat. Kolaborasi Yang Saat Ini Telah Berjalan Merupakan Langkah Yang

Dipilih Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir (UPTD TPA) Griyo Mulyo Jabon Yang Memiliki Tujuan Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Dan Menciptakan Biomassa Yang Ramah Lingkungan Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Berdasarkan Temuan Dalam Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Terdapat Permasalahan Yang Melatarbelakangi Kolaborasi Ini, Aktivitas Kepemimpinan, Peraturan Dasar Dan Prosedur Dalam Menjalankan Kolaborasi Serta Proses Bersama Yang Menunjukkan Praktek *Colaborative*. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menggandeng Multisektor Lain Untuk Ikut Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menunjukkan Adanya Praktek *Governance*. Maka Dari Itu Penelitian Ini Menggunakan Model *Collaborative Governance* Milik (Ansell & Gash, 2008) Dengan Empat Variabel Yaitu:

#### 1. Kondisi Awal

Berdasarkan Hasil Temuan Di Lapangan Dapat Diketahui Bahwa Sebelum Adanya Kolaborasi Ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mengalami Keadaan Darurat Sampah Hingga UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon Sempat Tutup Selama Beberapa Hari Karena Tidak Sanggup Menampung Sampah Lagi. Selain Itu, Inovasi Pengelolaan Sampah Yang Meliputi *Sanitary Landfill* Belum Dapat Dioperasikan. Permasalahan Tersebut Membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Mencari Solusi Untuk Mengatasi Permasalah Tersebut Melalui Kerja Sama Dengan Sektor Lainnya. Sedangkan,

Kepentingan Dari PT. PLN Nusantara Power Berpartisipasi Dalam Kolaborasi Ini Yaitu Untuk Mendapatkan Energi Terbarukan Yang Dapat Menggantikan Peran Batu Bara Dalam Proses Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sejalan Dengan Pendapat (Utami Et Al., 2020) Yang Menyatakan Bahwa Kondisi Awal Sebagai Langkah Awal Dalam Memulai Kerja Sama, Dimana Pasti Terdapat Perbedaan Baik Dari Sumber Daya Ataupun Kepentingan Yang Dimiliki Masing-Masing Sektor Sehingga Dari Perbedaan Tersebut Dapat Menjadi Pertimbangan Untuk Melakukan Kolaborasi Dengan Saling Melengkapi Demi Mencapai Visi Dan Tujuan Bersama. Kepentingan Yang Berbeda Tersebut Dapat Mendorong Pemangku Kepentingan Untuk Menunjukkan Komitmen Awal Dengan Saling Melengkapi Satu Sama Lain.

Ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Tersebut Memotivasi Mereka Untuk Melakukan Kerja Sama Dengan Sektor Lain. Menurut (Putri & Nurcahyanto, 2021) Adanya Motivasi Tersebut Dapat Memberikan Pengaruh Pada Insentif Berpartisipasi Dalam Kolaborasi. Dalam Insentif Berpartisipasi Ini Menjadi Harapan Dari Para Sektor Yang Bergabung Dalam Kolaborasi Agar Waktu Dan Energi Yang Dikeluarkan Selama Proses Kolaborasi Dapat Bermakna (Bustomi Et Al., 2022).

Dalam Kondisi Awal Ini Juga Dipengaruhi Oleh Potensi Dan Kekurangan/Hambatan Yang Dimiliki Oleh Masing-Masing Sektor. Berdasarkan Data Yang Ditemukan Selama Penelitian Sumber Daya Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yaitu

Sampah Yang Cukup Banyak Yang Setiap Harinya Mencapai 500 Ton Sampah Yang Dikirim Ke UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon. Volume Sampah Yang Cukup Tinggi Ini Jika Dibiarkan Saja Dapat Menjadi Permasalahan Besar. Namun Jika Sampah Tersebut Diolah Dengan Baik Dan Benar Dapat Menjadi Sumber Daya Yang Menghasilkan Sesuatu Yang Bermanfaat Lagi Di Kehidupan. Perbedaan Potensi Dan Kekurangan Tersebut Dapat Menjadi Permasalahan Jika Tidak Diidentifikasi Dengan Baik. Maka Dari Itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tidak Mampu Mengelolanya Sendiri Sehingga Membutuhkan Peran Dari Sektor Lain. (Bustomi Et Al., 2022) Berpendapat Bahwa Konflik Dapat Mempengaruhi Proses Kolaborasi Terhadap Kepentingan Pemerintah, Namun Jika Konflik Tersebut Dapat Diolah Dengan Baik Maka Kerja Sama Dapat Berjalan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menggandeng PT. PLN Nusantara Power Sebagai *Offtaker* Dan PT. Bangga Indonesia Mulia Sebagai Penyedia Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Samah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF).

## 2. Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan Adalah Variabel Dalam Kolaborasi Yang Mengatur Tentang Landasan Hukum Dan Pedoman Selama Proses Kolaborasi Berlangsung. Menurut (Ansell & Gash, 2008) Desain Kelembagaan Mempunyai Fungsi Sebagai Aturan Dasar Dalam Kerja Sama. Berdasarkan Data Yang Ditemukan Selama Penelitian Menunjukkan Bahwa Dalam Kolaborasi Ini Terdapat Aturan Dasar Yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah. UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon

Merupakan Salah Satu Badan Layanan Usaha Daerah Yang Dapat Menjalankan Kegiatan Bisnis Dan Mendapatkan Penghasilan Sendiri Sehingga Dapat Dimanfaatkan Dalam Pengelolaan Sampah Secara Langsung Tanpa Harus Masuk Ke Kas Daerah Terlebih Dahulu.

Kolaborasi Ini Kemudian Diresmikan Melalui Penandatanganan Mou Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. PLN Nusantara Power. Adanya Perjanjian Tersebut Dapat Menjadi Pedoman Bagi Para Sektor Dalam Menjalankan Proses Kolaborasi Lebih Terarah Sehingga Dapat Menghindari Hal-Hal Yang Tidak Diinginkan. *Collaborative Governance* Menjadi Sebuah Kerja Sama Yang Memiliki Arah Dan Tujuan, Namun Dalam Prosesnya Pasti Menemukan Hambatan Sehingga Membutuhkan Pedoman, Tata Cara, Dan Aturan Dalam Proses Kolaborasi (Penanggulangan Et Al., 2023). Adanya Peraturan Tersebut Dapat Membantu Kolaborasi Untuk Mencapai Keberhasilan, Namun Dibutuhkan Pemahaman Dan Kesepakatan Dari Masing-Masing Sektor Terkait Peran Dan Tanggung Jawabnya. Dalam Penandatanganan Mou Tersebut Juga Diawasi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guna Menunjukkan Bahwa Dalam Kolaborasi Ini Dilakukan Secara Transparan. Proses Transparansi Dalam Kolaborasi Dapat Dilaksanakan Secara Internal Maupun Eksternal (Putri & Nurcahyanto, 2021).

### 3. Kepemimpinan

Dalam Kolaborasi, Variabel Kepemimpinan Yang Kuat Dibutuhkan Agar Peluang Untuk Mencapai Keberhasilan Lebih Tinggi. Dalam Variabel Kepemimpinan Fasilitatif Dapat Diketahui Bahwa Bupati Kabupaten

Sidoarjo Menjadi Pencetus Ide Program *Collaborative Governance* Dalam Mengelola Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Yang Selanjutnya Dilimpahkan Kepada UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon Dalam Menjalankan Kerja Sama Dengan Sektor Lainnya Sehingga Dapat Mengatasi Permasalahan Sampah. Menurut Purnomo, Dkk (2018) Dalam (Trisniati Et Al., 2022) Kepemimpinan Fasilitatif Adalah Variabel Penting Yang Memiliki Fungsi Untuk Mengabungkan Pemangku Kepentingan Dengan Menyatukan Satu Sama Lain Dalam Suatu Kepentingan.

Berdasarkan Data Yang Didapatkan Di Lapangan Menunjukkan Bahwa Dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di Kabupaten Sidoarjo Peran Pemimpin Lebih Berfokus Sebagai Fasilitator Dan Mediator Dalam Menjalankan Kerja Sama Secara Operasional Ataupun Manajemen Untuk Mencapai Tujuan Kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Juga Memiliki Peran Sebagai Penghubung Antara PT. PLN Nusantara Power Dengan PT. Bangga Indonesia Mulia. (Ansell & Gash, 2008) Berpendapat Bahwa Kepentingan Sebagai Hal Yang Penting Dalam Menentukan Dan Meperjelas Aturan Dasar, Menumbuhkan Kepercayaan, Memfasilitasi Komunikasi Dan Memperluas Keuntungan Dalam Kolaborasi.

### 4. Proses Kolaborasi

#### a. Dialog Tatap Muka

Dalam Penelitian Yang Dilakukan Terhadap Kolaborasi Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Menunjukkan Adanya Proses Dialog Tatap Muka Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT. PLN Nusantara Power Dan PT. Bangga Indonesia Mulia. Menurut (Ansell & Gash, 2008) Dialog

Tatap Muka Merupakan Awal Dari Proses Kolaborasi Yang Mempengaruhi Kepercayaan, Komitmen, Dan Pemahaman Bersama. Dialog Tatap Muka Yang Dilakukan Biasanya Merupakan Pertemuan Rutin Dan Terstruktur Setiap Minggunya Berupa FGD Dan *Brainstorming* Guna Mengidentifikasi Potensi Dan Mengetahui Masalah Atau Pun Hambatan Yang Terdapat Dalam Proses Kolaborasi Baik Manajemen Maupun Operasional Sehingga Dapat Mencari Jalan Keluar Secara Bersama Serta Melakukan Rencana Untuk Langka Kedepannya Dalam Upaya Mengoptimalkan Kolaborasi Yang Dijalani.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam Kolaborasi Yang Melibatkan Berbagai Sektor Tentu Sangat Dibutuhkan Rasa Saling Percaya Satu Sama Lain. *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Melibatkan Berbagai Sektor, Antara Lain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT. PLN Nusantara Power, Dan PT. Bangga Indonesia Mulia Dimana Dalam Menjalankan Kolaborasi Memerlukan Rasa Saling Percaya Satu Sama Lain. Menurut Sudarmo (2011) Dalam (Aristy Et Al., 2021) Kepercayaan Antar Sektor Yang Berpartisipasi Dalam Kolaborasi Terjadi Karena Adanya Hubungan Profesional Yang Menjadi Faktor Keberhasilan Kolaborasi. Selain Membangun Kepercayaan Melalui Dialog Tatap Muka Yang Sering Dilakukan, Dapat Juga Melalui Pembuktian Dari Kinerja Yang Bertanggung Jawab Dalam Proses Kolaborasi Maka Dapat Membuktikan Bahwasanya Sektor Tersebut Dapat Dipercaya Dan Diandalkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menunjukkan Kinerjanya Melalui

Pelatihan Yang Diadakan Untuk Para Pekerja Yang Bertanggung Jawab Atas Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF). Sedangkan, PT. PLN Nusantara Power Membuktikan Kinerjanya Dengan Bertanggung Jawab Pada Komposisi Bahan Bakar Jumpatan Padat Agar Sesuai Dengan Standar Yang Dibutuhkan Sebagai Biomassa Dan PT. Bangga Indonesia Mulia Memiliki Tanggung Jawab Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Agar Bekerja Dengan Baik. Membangun Kepercayaan Adalah Proses Saling Memahami Antar Sektor Yang Berkolaborasi Sehingga Dapat Terbentuk Komitmen Dalam Menjalankan Kolaborasi Tersebut (Yasintha, 2020).

c. Komitmen Terhadap Proses Kolaborasi

Berdasarkan Temuan Di Lapangan Dapat Diketahui Bahwa Terdapat Kondisi Saling Kebergantungan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang Membutuhkan PT. PLN Nusantara Power Sebagai *Offtaker* Dalam Menjalankan Kolaborasinya Yang Dibantu Oleh PT. Bangga Indonesia Mulia Sebagai Penyedia Sarana Dan Prasaran Yang Dibutuhkan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF). Hal Tersebut Menunjukkan Adanya Tanggung Jawab Terhadap Proses Dan Saling Pengakuan Untuk Mendapatkan Keuntungan Melalui Proses Kolaborasi (Astari Et Al., 2019). Dalam Keberhasilan *Collaborative Governance* Dibutuhkan Komitmen Dalam Proses Kolaborasi. Namun, Keberhasilan Yang Didapatkan Juga Dapat Menjadi Pendorong Dalam Berkomitmen. Maka Dari Itu Kepentingan Yang Melatarbelakangi Kerja Sama Ini Juga Dapat Mendorong Komitmen Terhadap

Proses Untuk Dapat Mencapai Tujuan Kolaborasi. Sedangkan, Hasil Sementara Yang Didapatkan Dalam Kolaborasi Ini Yaitu Keberhasilan Pembuatan Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) Dapat Mempengaruhi Komitmen Multi Sektor Untuk Terus Melakukan Kolaborasi.

d. Pemahaman Bersama

Dalam Sebuah Kolaborasi Tentunya Dibutuhkan Pemahaman Bersabai Terkait Visi, Misi, Tujuan Dan Permasalahan Yang Akan Diatasi. Sejalan Dengan Pendapat (Ipan Et Al., 2021) Yang Menjelaskan Tentang Kolaborasi Yang Membutuhkan Pemahaman Bersama Dalam Upaya Mencapai Tujuan Dari Program Yang Dilakukan Sehingga Dapat Menyelesaikan Masalah Yang Ada. Berdasarkan Temuan Di Lapangan Menunjukkan Bahwa Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemahaman Bersama Melalui Dialog Tatap Muka Yang Telah Dilakukan Dengan PT. PLN Nusantara Power Dan PT. Bangga Indonesia Mulia. Selain Itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Juga Melakukan Pemahaman Bersama Instansi Lain Dalam Menjalankan Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Melalui Kunjungan-Kunjungan Kerja Dari Pemerintah Daerah Lain Hingga Mahasiswa. Menurut (Aristy Et Al., 2021) Menunjukkan Pemahaman Bersama Dapat Ditingkatkan Dengan Adanya Komunikasi Yang Intens Dan Dialog Tatap Muka, Karena Jika Hal Tersebut Terlewatkan Maka Dapat Menimbulkan Suatu Permasalahan Atau Konflik Dalam Kolaborasi Tersebut.

e. Hasil Sementara

*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Yang Dilakukan Oleh

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT. PLN Nusantara Power, Dan PT. Bangga Indonesia Mulia Telah Menghasikan Hasil Nyata Yaitu Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP) Yang Telah Diuji Standar Sesuai Spesisifikasi Biomassa Yang Dibutuhkan Dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap Yang Dilakukan Di PLTU Paiton Dan Tanjung Awar-Awar. Menurut (Ansell & Gash, 2008) Hasil Sementara Merupakan Hasil Nyata Dalam Proses Kolaborasi Yang Dapat Menentukan Keberhasilan Kolaborasi Itu Sendiri. Namun Berdasarkan Data Yang Didapatkan Dilapangan Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Hanya Dapat Mengelolaan 36% RDF Organik Atau Sekitar 376.033 Kg Dan 7% RDF Fluff Atau Sekitar 73.117 Kg Dari Total Sampah Yang Dapat Diolah Yaitu Mencapai 1.044.538 Kg Selama Periode Januari-April 2023. Pengelolaan Sampah Tersebut Masih Menunjukkan Jumlah Yang Kecil Daripada Sampah Yang Masuk Ke UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon Yang Mencapai 68.697.732 Kg Periode Januari-April 2023. Meskipun Demikian, Hasil Sementara Yang Diperoleh Dapat Menjadi Motivasi Bagi Seluruh Sektor Yang Terlibat Dalam Kolaborasi Untuk Lebih Meningkatkan Kinerjanya Sehingga Dapat Mecipai Tujuan Kolaborasi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian Yang Telah Dilakukan Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF) Di Kabupaten Sidoarjo Menunjukkan Dalam Variabel Kondisi Awal Telah Berjalan Dengan Baik Karena Terdapat Kepentingan Dari



Masing-Masing Sektor Sehingga Memotivasi Mereka Untuk Berpartisipasi Dalam Kolaborasi Tersebut. Pada Variabel Desain Kelembagaan Juga Berjalan Dengan Baik Karena Terdapat Dasar Hukum Yang Kemudian Disahkan Dalam Mou Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. PLN Nusantara Power.

Kemudian Pada Kepemimpinan Fasilitatif Telah Berjalan Dengan Baik Ditunjukkan Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang Berperan Sebagai Fasilitator Dan Mediator Antara PT. PLN Nusantara Power Dan PT. Bangga Indonesia Mulia. Variabel Terakhir Yaitu Proses Kolaborasi Yang Juga Menunjukkan Adanya Proses Dialog Tatap Muka Melalui FGD Dan Brainstorming Sehingga Dapat Membangun Kepercayaan Dengan Pembuktian Melalui Kualitas Kinerja Dan Transparansi Dalam Seluruh Prosesnya. Adanya Kondisi Saling Ketergantungan Membuat Para Aktor Kolaborasi Memiliki Komitmen Terhadap Proses Kolaborasi. Selain Itu Dalam Kolaborasi Ini Juga Dilakukan Pemahaman Bersama Mengenai Visi, Misi Dan Tujuan Agar Dapat Mencapai Hasil Yang Diinginkan. Dalam Kolaborasi Ini Hasil Sementara Yang Telah Dicapai Adalah Keberhasilan Mengelola Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumpsutan Padat Sehingga Dapat Menggantikan Bahan Bakar Batu Bara Dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Namun, Meskipun Demikian Inovasi Pengelolaan Sampah Tersebut Belum Dapat Mengatasi Permasalahan Di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Kesimpulan Yang Telah Dijelaskan Diatas. Maka Peneliti Merekomendasikan Saran Agar Dalam Kolaborasi Ini Para Sektor Dapat

Meningkatkan Perannya Masing-Masing Dan Juga Melibatkan Masyarakat Dan Sektor Lain Sehingga Dapat Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aristy, K. W., Candradewini, C., & Buchari, R. A. (2021). Proses Kolaboratif Dalam Pengembangan Geopark Pongkor Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 138. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35064>
- Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). *JPPM: Journal Of Public Policy And Management*, 1(1), 2715–2952.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Prespektif Administrasi Publik. In *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam

- Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64.  
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, D. J. S. & R. R. I. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif. In *CV. Pustaka Ilmu Group*.
- Hertati, D. (2023). Evaluation Of The Quality Of Web-Based Integrated Administration Services (PATEN) In Sidoarjo District, Indonesia. *Lex Localis*, 21(1), 1–15.  
[https://doi.org/10.4335/21.1.1-15\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.1.1-15(2023))
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Penanggulangan, S., Bengkulu, K., Monika, E., Aprianty, H., Darmawi, E., Hazairin, P., Kota, S. H., Indonesia, B., Gelandangan, F., & Dalam, P. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Indonesia Merupakan Negara Berkembang Dan Rentan Kemiskinan Yang Diwujudkan Dalam Perda Kota Sesuai Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun Dasar Negara Republik Indonesia M Gepeng Di Kota Bengkulu , Sehingga Menarik Per. 12(1), 116–127.*
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(2), 68–85.
- Trisniati, E., Cadith, J., Sapto Nugroho, K., Studi Administrasi Publik, P., Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, F., Sultan Ageng Tirtayasa Banten, U., Raya Palka Km, J., & Cipocok Jaya Serang, P. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Collaborative Governance In Developing Special Economic Zone. *Jurnal Governansi*, 8(1), 1–18.
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>